

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA TBK. Kegiatan Usaha Utama:

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550
Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540
E-mail: investor.relations@jasamarga.co.id
Situs: www.jasamarga.com

Kantor Cabang

9 (sembilan) kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya dan Medan

PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 491.465.665 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) saham baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Estimasi jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I adalah sekitar Rp1.785.714.285.714 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah). Harga pelaksanaan HMETD ("Harga Pelaksanaan") dan rasio HMETD akan ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan memiliki hak untuk melakukan perubahan pada ketentuan-ketentuan HMETD ini dengan mempertimbangkan perubahan atas keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai. Ketentuan-ketentuan penerbitan HMETD dalam PMHMETD I, termasuk Harga Pelaksanaan dan jumlah final dari saham yang akan ditawarkan akan diumumkan pada waktunya.

Seluruh Saham HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham HMETD, maka seluruh sisa Saham HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Sisa Saham HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK YANG AKAN DIKELUARKAN PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2016.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 7 NOVEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 11 NOVEMBER 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 11 NOVEMBER 2016 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 6,74%.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO INVESTASI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PEMBELI SIAGA

Akan ditentukan kemudian

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2016

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 29 Agustus 2016	Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	: 4 November 2016
Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif	: 24 Oktober 2016	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 7 November 2016
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 3 November 2016	Periode Perdagangan HMETD	: 7-11 November 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)		Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 7-11 November 2016
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 31 Oktober 2016	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 9-15 November 2016
Pasar Tunai	: 3 November 2016	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Tambahan Saham	: 15 November 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (ExRight)		Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham	: 16 November 2016
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 1 November 2016	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Tambahan Saham	: 17 November 2016
Pasar Tunai	: 4 November 2016		

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No. AA.KU09.03.1375 pada tanggal 15 September 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 33/2015**") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham HMETD, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham beserta addendumnya, seluruh sisa Saham HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Sisa Saham HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini. Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**SBHMETD**") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 491.465.665 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) saham baru dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah). Estimasi jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sekitar Rp1.785.714.285.714 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah). Harga Pelaksanaan dan rasio HMETD akan ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan memiliki hak untuk melakukan perubahan pada ketentuan-ketentuan HMETD ini dengan mempertimbangkan perubahan atas keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai. Ketentuan-ketentuan penerbitan HMETD dalam PMHMETD I, termasuk Harga Pelaksanaan dan jumlah final dari saham yang akan ditawarkan akan diumumkan pada waktunya.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 7 November 2016 sampai dengan 11 November 2016. Saham HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel dan pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 7 November 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 11 November 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham HMETD, maka seluruh sisa Saham HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Sisa Saham HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

Berdasarkan laporan dari BAE PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS per tanggal 31 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
- Seri A Dwiwarna	1	500	
- Seri B	19.039.999.999	9.519.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			
1. Pemerintah Republik Indonesia	1	500	0,00
- Saham Biasa (Seri B)			
2. Pemerintah Republik Indonesia	4.759.999.999	2.379.999.999.500	70,00
3. Dewan Komisaris dan Direksi			
- Ir. Hasanudin, M.Eng.Sc.	8.500	4.250.000	0,00
- Ir. Muh. Najib Fauzan, MSc.	110.200	55.100.000	0,00
- Subakti Syukur	154.000	77.000.000	0,00
4. Masyarakat	2.039.727.301	1.019.863.650.500	29,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.800.000.000	3.400.000.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	12.240.000.000	6.120.000.000.000	

PMHMETD I

Jenis Penawaran	:	HMETD
Nilai Nominal	:	Rp500,- (lima ratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Akan ditentukan kemudian
Rasio Konversi	:	Akan ditentukan kemudian
Dilusi Kepemilikan	:	6,74% (enam koma tujuh empat persen)
Periode Perdagangan HMETD	:	7-11 November 2016
Periode Pelaksanaan HMETD	:	7-11 November 2016
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	:	7 November 2016
Pencatatan	:	BEI

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
				Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000		19.040.000.000	9.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)						
1. Pemerintah Republik Indonesia	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Biasa (Seri B)						
2. Pemerintah Republik Indonesia	4.759.999.999	2.379.999.999.500	70,00	5.104.025.964	2.552.012.982.000	70,00
3. Publik	2.040.000.000	1.020.000.000.000	30,00	2.187.439.700	1.093.719.850.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.800.000.000	3.400.000.000.000	100,00	7.291.465.665	3.645.732.832.500	100,00
Saham dalam Portepel	12.240.000.000	6.120.000.000.000		11.748.534.335	5.874.267.167.500	

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 *juncto* Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan sebelum Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal para pemegang saham publik tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya, maka para pemegang saham publik akan mengalami penurunan kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 6,74%.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 7 November 2016 sampai dengan 11 November 2016 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 29 Agustus 2016 untuk menyetujui rencana PMHMETD I yang akan dilakukan oleh Perseroan sekitar Rp1.785.714.285.714 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 491.465.665 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) lembar Saham HMETD.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, PMHMETD I ini menjadi efektif setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan diperolehnya pernyataan efektif OJK yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016.

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan untuk mendanai pembangunan Jalan Tol tersebut khususnya 3 Ruas Jalan Tol baru yang akan dibangun yaitu:

- Sekitar 50% untuk ruas Semarang – Batang sepanjang 75 km;
- Sekitar 30% untuk ruas Pandaan – Malang sepanjang 37,6 km; dan
- Sekitar 20% untuk ruas Jakarta – Cikampek II sepanjang 64 km.

PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah) 30 Juni 2016
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	82.012.682
Utang kontraktor	1.459.622.804
Utang pajak	314.777.648
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	219.237.540
Beban akrual	1.296.493.511
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	126.108.989
Utang lembaga keuangan bukan bank	750.000.000
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	2.497.305.316
Utang obligasi	2.900.000.000
Liabilitas pembebasan tanah	1.124.018.714
Utang sewa pembiayaan	21.889.999
Provisi pelapisan jalan tol	297.164.695
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	11.088.631.898
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pendapatan diterima di muka	146.890.866
Liabilitas pajak tangguhan	486.203.441
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	8.899.610.827
Utang obligasi	3.173.524.260
Liabilitas kerjasama operasi	820.300
Liabilitas pembebasan tanah	1.429.591.393
Utang sewa pembiayaan	26.515.220
Provisi pelapisan jalan tol	239.913.709
Liabilitas jangka panjang lainnya	295.927.200
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.023.655.605
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	15.722.652.821
TOTAL LIABILITAS	26.811.284.719

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada (i) tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk periode-periode tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Tjoa Tjek Nien, CPA pada tanggal 26 Agustus 2016, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada (ii) 31 Desember 2014, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun-tahun tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), akuntan publik independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Saptoto Agustomo, CPA pada tanggal 28 Januari 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)		
	Per 30 Juni 2016	Per 31 Desember 2015	2014*
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4.046.532.960	3.323.221.103	3.290.783.678
Investasi jangka pendek	7.738.683	6.955.133	7.143.512
Piutang lain-lain	811.427.994	164.374.388	48.089.417
Persediaan	11.847.446	20.153.707	21.959.567
Biaya dibayar dimuka	34.082.874	69.922.865	55.174.260
Pajak dibayar dimuka	140.158.696	144.419.307	122.633.703
TOTAL ASET LANCAR	5.051.788.653	3.729.046.503	3.545.784.137
ASET TIDAK LANCAR			

Piutang lain-lain	148.922.279	132.813.579	99.281.519
Dana ditetapkan penggunaannya	825.706.529	1.486.630.839	816.903.789
Aset pajak tangguhan	22.267.427	12.431.574	2.839.975
Investasi pada entitas asosiasi - neto	160.151.180	166.001.306	171.345.274
Aset tetap - neto	922.623.790	913.842.793	701.684.883
Properti investasi	83.963.473	84.335.110	-
Aset tak berwujud - neto			
Hak pengusahaan jalan tol	28.170.751.083	24.864.720.272	23.941.404.497
Lainnya	3.203.325.262	3.957.069.367	2.169.943.359
Goodwill	41.848.567	41.848.567	41.848.567
Aset keuangan lainnya	337.297.444	329.107.444	244.607.444
Aset tidak lancar lainnya	1.243.657.562	1.007.135.133	124.319.199
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	35.160.514.596	32.995.935.984	28.314.178.506
TOTAL ASET	40.212.303.249	36.724.982.487	31.859.962.643

Catatan: *) Disajikan kembali

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	82.012.682	137.465.749	182.096.348	
Utang kontraktor	1.459.622.804	1.661.724.335	998.080.943	
Utang pajak	314.777.648	163.865.088	263.524.321	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	219.237.540	47.430.707	73.167.095	
Beban akrual	1.296.493.511	356.947.861	320.441.733	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	126.108.989	132.089.594	84.437.680	
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	2.497.305.316	1.121.696.392	653.660.986	
Utang lembaga keuangan bukan bank	750.000.000	1.347.897.302	-	
Utang obligasi	2.900.000.000	1.477.377.192	-	
Liabilitas pembebasan tanah	1.124.018.714	1.119.336.038	1.500.719.209	
Utang sewa pembiayaan	21.889.999	14.246.400	15.484.840	
Provisi pelapisan jalan tol	297.164.695	163.710.293	209.396.402	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	11.088.631.898	7.743.786.951	4.301.009.557	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pendapatan diterima dimuka	146.890.866	122.481.772	74.577.125	
Liabilitas pajak tangguhan	486.203.441	556.877.839	390.457.191	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	8.899.610.827	7.303.051.412	6.484.840.290	
Utang obligasi	3.173.524.260	4.671.253.480	6.144.430.063	
Liabilitas kerjasama operasi	820.300	820.300	22.206.213	
Liabilitas pembebasan tanah	1.429.591.393	1.523.256.730	1.369.223.143	
Utang sewa pembiayaan	26.515.220	21.890.917	34.479.992	
Provisi pelapisan jalan tol	239.913.709	176.067.644	153.254.266	
Liabilitas jangka panjang lainnya	295.927.200	1.281.190.306	819.424.909	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.023.655.605	955.640.670	1.045.330.573	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	15.722.652.821	16.612.531.070	16.538.223.765	
TOTAL LIABILITAS	26.811.284.719	24.356.318.021	20.839.233.322	
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham – nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) per saham				
Modal dasar – 19.040.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
- 1 saham seri A Dwiwarna dan 6.799.999.999 saham seri B	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	
Tambahan modal disetor – neto	2.453.890.100	2.453.890.100	2.453.890.100	
Saldo laba	5.527.563.691	4.895.330.345	3.920.148.320	
Penghasilan komprehensif lain:				
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	3.209.032	2.425.483	2.613.862	
Kerugian actuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(410.471.210)	(333.140.643)	(316.506.521)	
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	10.974.191.613	10.418.505.285	9.460.145.761	
Kepentingan Nonpengendali	2.426.826.917	1.950.159.181	1.560.583.560	
TOTAL EKUITAS	13.401.018.530	12.368.664.466	11.020.729.321	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	40.212.303.249	36.724.982.487	31.859.962.643	

Catatan: *) Disajikan kembali

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember	
	2016	2015 (Tidak Diaudit)	2015	2014*
PENDAPATAN				
Pendapatan tol dan usaha lainnya	4.214.206.289	3.639.352.831	7.630.678.119	7.227.786.012
Pendapatan konstruksi	2.497.250.479	475.769.405	2.217.563.931	1.946.031.295
Total	6.711.456.768	4.115.122.236	9.848.242.050	9.173.817.307
BEBAN PENDAPATAN				
Beban tol dan usaha lainnya	(1.935.555.463)	(1.774.271.640)	(3.518.021.450)	(3.562.757.971)
Beban konstruksi	(2.481.120.705)	(470.772.295)	(2.202.400.639)	(1.921.067.434)
Total	(4.416.676.168)	(2.245.043.935)	(5.720.422.089)	(5.483.825.405)
LABA BRUTO	2.294.780.600	1.870.078.301	4.127.819.961	3.689.991.902
Penghasilan lain-lain	34.397.721	68.442.772	90.042.786	126.290.856
(Penghasilan) keuangan	115.655.157	112.665.173	210.791.793	191.583.765
Beban pajak atas penghasilan keuangan	(23.131.031)	(21.811.436)	(27.925.767)	(30.017.014)
Beban umum and administrasi	(443.372.314)	(403.543.224)	(893.258.848)	(884.842.796)
Beban lain-lain	(19.248.825)	(17.157.055)	(29.804.780)	(20.283.190)
LABA USAHA	1.959.081.308	1.608.674.531	3.477.665.145	3.072.723.524
Biaya keuangan - neto	(744.944.677)	(675.937.938)	(1.405.042.942)	(1.215.320.255)
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	(4.954.541)	(3.080.669)	(4.317.970)	(6.741.959)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.209.182.090	929.655.924	2.068.304.233	1.850.661.310
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(394.005.208)	(296.460.683)	(585.399.690)	(533.602.367)
Tangguhan	59.139.018	(61.453.214)	(163.703.997)	(80.044.771)
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(334.866.190)	(357.913.897)	(749.103.687)	(613.647.138)
LABA PERIODE BERJALAN	874.315.900	571.742.027	1.319.200.546	1.237.014.172
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya				
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(77.330.567)	19.773.646	(16.634.122)	(57.314.587)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	783.549	(102.626)	(188.379)	515.602
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN	(76.547.018)	19.671.020	(16.822.501)	(56.798.985)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	797.768.882	591.413.047	1.302.378.045	1.180.215.187
Total penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	849.284.536	662.653.844	1.449.326.765	1.365.670.215
Kepentingan nonpengendali	(51.515.654)	(71.240.797)	(146.948.720)	(185.455.028)
TOTAL	797.768.882	591.413.047	1.302.378.045	1.180.215.187
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	925.509.663	642.914.315	1.466.381.586	1.421.729.172
Kepentingan nonpengendali	(51.193.763)	(71.172.288)	(147.181.040)	(184.715.000)
TOTAL	874.315.900	571.742.027	1.319.200.546	1.237.014.172
LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH)	136,1	94,55	215,64	209,08

Catatan: *) Disajikan kembali

3. LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember	
	2016	2015	2015	2014*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pendapatan tol	3.851.848.425	3.410.197.461	7.121.024.701	6.646.392.546
Penerimaan kas dari pendapatan lainnya	219.903.692	219.000.336	419.856.168	581.393.466
Pembayaran kepada pemasok	(1.462.391.514)	(905.376.197)	(1.649.711.061)	1.954.389.874
Pembayaran kepada karyawan	(913.322.975)	(819.264.433)	(1.585.759.184)	(1.288.704.552)
Pembayaran beban kerjasama operasi	(118.881.942)	(173.306.693)	(294.224.080)	(313.039.817)
Pembayaran biaya pelapisan ulang	(38.125.633)	(35.700.415)	(289.329.811)	(348.405.365)
Kas neto diperoleh dari operasi	1.539.030.053	1.695.550.059	3.721.856.733	3.323.246.404

Penerimaan bunga	95.870.800	90.699.369	178.822.453	255.622.494
Pembayaran bunga	(743.558.774)	(586.785.312)	(1.172.057.381)	(1.117.383.678)
Pembayaran pajak penghasilan	(419.758.070)	(443.496.616)	(1.015.078.776)	(702.099.525)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	471.584.009	755.967.500	1.713.543.029	1.759.385.695
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penambahan hak perusahaan jalan tol dan aset tak berwujud lainnya	(1.779.020.300)	(702.853.640)	(3.366.145.268)	(3.327.023.000)
Penambahan investasi jangka panjang - neto	(7.736.669)	(406.090.065)	(472.046.200)	-
Penambahan aset tetap dan properti investasi	(105.385.183)	(111.630.152)	(174.763.419)	(232.164.307)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.892.142.152)	(1.220.573.857)	(4.012.954.887)	(3.559.187.307)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	3.639.159.873	263.990.859	1.936.892.064	1.225.125.080
Utang lembaga keuangan bukan bank	-	500.000.000	1.349.281.896	-
Penerbitan utang obligasi	-	-	-	997.124.948
Penerimaan dari tambahan penerbitan saham di entitas anak oleh pihak nonpengendali	528.681.542	335.686.541	536.756.661	185.248.474
Penempatan dana ditetapkan penggunaannya - neto	(322.093.904)	(30.516.154)	47.199.454	(374.312.610)
Pembayaran dividen	(293.276.317)	(491.199.561)	(491.199.561)	(537.102.256)
Pembayaran liabilitas jangka panjang				
Utang bank	(644.344.039)	(453.866.145)	(821.884.270)	(495.195.199)
Utang obligasi	(77.377.192)	-	-	(700.000.000)
Utang lembaga keuangan bukan bank	(597.897.302)	-	-	-
Pembayaran liabilitas pembebasan tanah	(88.982.661)	(189.836.139)	(225.196.961)	1.275.635.518
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	2.143.870.000	(65.740.599)	2.331.849.283	1.576.523.955
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	723.311.857	(530.346.956)	32.437.425	(223.277.657)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.323.221.103	3.290.783.678	3.290.783.678	3.514.061.335
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4.046.532.960	2.760.436.722	3.323.221.103	3.290.783.678

Catatan: *) Disajikan kembali

4. RASIO KEUANGAN

Keterangan	Per 30 Juni		Per 31 Desember	
	2016	2015	2014*	
Rasio Keuangan (%)				
Marjin Laba Bersih	21,96%	19,22%	19,67%	
Marjin Operasi	46,49%	45,57%	42,51%	
Marjin EBITDA	61,08%	59,79%	59,61%	
EBITDA terhadap Beban Bunga	345,53%	324,71%	354,53%	
Tingkat Pengembalian atas Ekuitas (ROE)	6,91%	11,86%	12,90%	
Tingkat Pengembalian atas Aset (ROA)	2,30%	3,99%	4,46%	
Rasio Lancar	45,56%	48,16%	82,44%	
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	200,07%	196,92%	189,09%	
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	66,67%	66,32%	65,41%	
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	63,09%	7,35%	-10,69%	
Laba Usaha	21,78%	13,18%	36,01%	
Laba Bersih	43,96%	3,14%	42,69%	
Total Aset	9,50%	15,27%	13,52%	
Total Liabilitas	10,08%	16,88%	16,58%	
Total Ekuitas	8,35%	12,23%	8,16%	

Catatan: *) Disajikan kembali

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015
<i>Debt to Equity ratio</i> tidak melebihi 5,0x ¹⁾	2,00x	1,97x
<i>Interest Coverage Ratio</i> tidak kurang dari 1,25x ²⁾	3,45x	3,25x

1) Perhitungan *Debt to Equity ratio* yaitu Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas

2) Perhitungan *Coverage ratio* yaitu EBITDA dibagi dengan beban bunga Perseroan

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen berikut ini disusun berdasarkan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan, yang dicantumkan dalam Prospektus ini. Investor harus membaca Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen berikut ini bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut. Pembahasan ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan peristiwa-peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang. Hasil aktual Perseroan dapat berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut sebagai akibat dari faktor-faktor seperti yang diuraikan dalam Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Aset

Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp40.212.303.249 ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp5.051.788.653 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp35.160.514.596 ribu. Aset Perseroan meningkat sebesar Rp3.487.320.762 ribu atau 9,50% dibandingkan aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp36.724.982.487 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tak berwujud neto Perseroan seiring dengan pembangunan pada ruas-ruas jalan tol baru yang dibangun oleh Perseroan.

Aset lancar Perseroan terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang lain-lain lancar, persediaan, biaya dibayar di muka dan pajak dibayar dimuka. Aset lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp5.051.788.653 ribu, meningkat sebesar Rp1.322.742.150 ribu atau 35,47% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.729.046.503 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya nilai kas dan setara kas sebesar Rp723.311.857 ribu atau 21,77% dari Rp3.323.221.103 ribu menjadi Rp4.046.532.960 ribu. Peningkatan kas dan setara kas terjadi terutama karena Perseroan menerima kas dari pendapatan tol serta diperolehnya utang bank yang berasal dari pihak berelasi. Perolehan kas dari utang bank ini akan digunakan untuk pelunasan obligasi seri Q yang akan jatuh tempo pada 6 Juli 2016.

Piutang lain-lain lancar meningkat sebesar Rp647.053.606 ribu atau 393,65% menjadi Rp811.427.994 ribu pada 30 Juni 2016 dibandingkan dengan nilai piutang lain-lain lancar pada 31 Desember 2015 sebesar Rp164.374.388 ribu. Sebagian besar peningkatan ini terjadi karena adanya pendapatan yang akan diterima dari Kementerian Pekerjaan Umum atas realisasi dana talangan untuk pembebasan lahan di Entitas Anak.

Aset tidak lancar Perseroan terdiri dari piutang lain-lain, dana ditetapkan penggunaannya, aset pajak tangguhan, investasi pada Entitas Asosiasi, aset tetap-neto, properti investasi, Aset tak berwujud-neto, goodwill, aset keuangan lainnya dan aset lain-lain. Nilai aset tidak lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp35.160.514.596 ribu, meningkat sebesar Rp2.164.578.612 ribu atau 6,56% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp32.995.935.984 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tak berwujud Perseroan seiring dengan kegiatan konstruksi ruas-ruas tol baru Perseroan di Entitas Anak.

Dana ditetapkan penggunaannya Perseroan turun sebesar Rp660.924.310 ribu dari sebesar Rp1.486.630.839 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp825.706.529 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan karena pendapatan dari pengoperasian JORR Seksi S yang sebelumnya dicatatkan dalam rekening khusus Perseroan telah diserahkan kepada Pemerintah sesuai Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Kembali Penugasan Pelaksanaan Pengoperasian Sementara dan Pemeliharaan Jalan Tol JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) Nomor 01/BA/M/2016 dan Nomor 12/BA-DIR/2016 tanggal 16 Maret 2016 senilai Rp1.064.017.216 ribu.

Aset tetap neto meningkat sebesar Rp8.780.997 ribu atau meningkat 0,96% dari sebesar Rp913.842.793 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi Rp922.623.790 ribu pada 30 Juni 2016. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan penambahan aset tetap di Induk Perusahaan dan Entitas Anak.

Aset tak berwujud neto lainnya menurun hingga Rp753.744.105 ribu atau 19,05% dari sebesar Rp3.957.069.367 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp3.203.325.262 ribu pada 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan karena adanya kegiatan konstruksi pada ruas-ruas tol baru.

Liabilitas

Liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp26.811.284.719 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp11.088.631.898 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp15.722.652.821 ribu. Liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp2.454.966.698 ribu atau 10,08% dibandingkan liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp24.356.318.021 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan karena Perseroan memperoleh tambahan pinjaman dari pihak berelasi yang digunakan untuk pembangunan ruas tol-tol baru.

Liabilitas jangka pendek Perseroan terdiri dari utang usaha, utang kontraktor, utang pajak, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek serta liabilitas yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka pendek Perseroan

pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp11.088.631.898 ribu, meningkat sebesar Rp3.344.844.947 ribu atau 43,19% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp7.743.786.951 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang obligasi dan utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun masing-masing sebesar Rp2.900.000.000 ribu dan Rp2.497.305.316 ribu.

Utang kontraktor turun sebesar Rp202.101.531 ribu atau 12,16% dari sebesar Rp1.661.724.335 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi Rp1.459.622.804 ribu pada 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan telah membayar sebagian utangnya kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan melunasi utang kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Aremix 3M, PT Wanita Mandiri Perkasa, PT Barito Permai dan PT Helga Prima sehubungan dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain.

Beban akrual Perseroan meningkat sebesar Rp939.545.650 ribu atau 263,22% pada 31 Desember 2015 dari sebesar Rp356.947.861 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi Rp1.296.493.511 ribu pada 30 Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya beban kontraktor untuk pembangunan ruas-ruas tol baru.

Utang bank yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun meningkat sebesar Rp1.375.608.924 ribu atau 122,64% dari Rp1.121.696.392 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi Rp2.497.305.316 ribu pada 30 Juni 2016. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan memperoleh utang bank dari pihak berelasi sehingga nilai yang harus dilunasi dalam jangka waktu setahun mencapai Rp2.167.821.039 ribu.

Utang lembaga keuangan bukan bank menurun sebesar Rp597.897.302 ribu atau 44,36% dari Rp1.347.897.302 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi Rp750.000.000 ribu pada 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan Perseroan melalui Entitas Anaknya sudah melunasi pinjaman modal kerja kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Utang obligasi yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun meningkat sebesar Rp1.422.622.808 ribu atau sebesar Rp96,29% dari sebesar Rp1.477.377.192 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi Rp2.900.000.000 ribu pada 30 Juni 2016. Peningkatan ini terjadi karena Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar utang obligasi seri Q, S-B dan R dengan total senilai Rp2.900.000.000 ribu.

Liabilitas jangka panjang Perseroan terdiri dari pendapatan diterima dimuka, liabilitas pajak tangguhan, utang bank, utang obligasi, liabilitas kerjasama operasi, liabilitas pembebasan tanah, utang sewa pembiayaan, provisi pelapisan jalan, liabilitas jangka panjang lainnya dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar 15.722.652.821 ribu, turun sebesar Rp889.878.249 ribu atau 5,36% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp16.612.531.070 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan karena utang obligasi Perseroan menurun sebesar Rp1.497.729.220 ribu atau 32,06% dari sebesar Rp4.671.253.480 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi Rp3.173.524.260 ribu pada 30 Juni 2016. Penurunan utang usaha ini disebabkan oleh reklasifikasi obligasi Seri R senilai Rp1.500.000.000 ribu yang jatuh tempo pada tahun 2017 menjadi utang jangka pendek.

Utang bank Perseroan meningkat sebesar Rp1.596.559.415 ribu atau 21,86% dari sebesar Rp7.303.051.412 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp8.899.610.827 ribu pada 30 Juni 2016. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan memperoleh pinjaman kredit investasi untuk pembangunan ruas-ruas tol baru.

Liabilitas pembebasan tanah turun sebesar Rp93.665.337 ribu atau 6,15% dari sebesar Rp1.523.256.730 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.429.591.393 ribu pada 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelunasan pada ruas-ruas tol yang sudah sepenuhnya beroperasi.

Liabilitas jangka panjang lainnya turun sebesar Rp985.263.106 ribu atau 76,90% dari sebesar Rp1.281.190.306 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp295.927.200 ribu pada 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan karena pendapatan dari pengoperasian JORR Seksi S yang sebelumnya dicatatkan dalam rekening khusus Perseroan telah diserahkan kepada Pemerintah sesuai Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Kembali Penugasan Pelaksanaan Pengoperasian Sementara dan Pemeliharaan Jalan Tol JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) Nomor 01/BA/M/2016 dan Nomor 12/BA-DIR/2016 tanggal 16 Maret 2016.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang meningkat sebesar Rp68.014.935 ribu dari sebesar Rp955.640.670 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.023.655.605 ribu pada 30 Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya liabilitas program kesehatan pensiunan dan program purna karya Perseroan.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp13.401.018.530 ribu, meningkat sebesar Rp1.032.354.064 ribu atau 8,35% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp12.368.664.466 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya saldo laba Perseroan sebesar Rp632.233.346 ribu dari sebesar Rp4.895.330.345 ribu pada 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp5.527.563.691 ribu pada 30 Juni 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Aset

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp36.724.982.487 ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp3.729.046.503 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp32.995.935.984 ribu. Aset Perseroan meningkat sebesar Rp4.865.019.844 ribu atau 15,27% menjadi Rp36.724.982.487 ribu jika dibandingkan aset Perseroan pada 31 Desember 2014 sebesar Rp31.859.962.643 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tak berwujud-neto Perseroan seiring dengan meningkatnya proses pembebasan lahan dan

pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh Perseroan. Pada tahun 2015, Perseroan telah mengoperasikan ruas Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 km melalui Entitas Anak PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT).

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.729.046.503 ribu, meningkat sebesar Rp183.262.366 ribu atau 5,17% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2014 sebesar Rp3.545.784.137 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah piutang lain-lain dan meningkatnya kas dan setara kas. Piutang lain-lain meningkat sebesar Rp116.284.971 ribu atau 241,81% dibandingkan nilai piutang lain-lain pada 31 Desember 2014 sebesar Rp48.089.417 antara lain disebabkan oleh Perseroan membiayai terlebih dahulu pembebasan tanah (*land capping*) yang menjadi tanggungan Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, seperti pada PT Marga Nujasumo Agung (MNA) (sekarang JSM) sebesar Rp9,78 miliar dalam rangka pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp32.995.935.984 ribu, meningkat sebesar Rp4.681.757.478 ribu atau 16,54% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp28.314.178.506 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tak berwujud neto Perseroan sebesar Rp2.710.441.783 ribu atau sebesar 10,38% jika dibandingkan dengan nilai aset tak berwujud Perseroan pada tahun sebelumnya sebesar Rp26.111.347.856 ribu. Peningkatan aset tak berwujud neto disebabkan oleh kegiatan konstruksi dan pembebasan lahan pada ruas-ruas tol baru.

Dana ditetapkan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar Rp669.727.050 ribu atau sekitar 81,98% dari Rp816.903.789 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi Rp1.486.630.839 ribu pada 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pembentukan rekening khusus atas pendapatan dari pengoperasian JORR Seksi S sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80.1/ KPTS/M/ 2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR S).

Aset tetap neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp212.157.910 ribu atau 30,24% dari Rp701.684.883 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi Rp913.842.793 ribu pada 31 Desember 2015. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan melakukan penambahan aset tetap pemilihan langsung berupa gedung kantor dan bangunan lain serta peralatan operasi dan kantor.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp3.517.084.699 ribu atau 16,88% menjadi Rp24.356.318.021 ribu jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp20.839.233.322 ribu. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp3.442.777.394 ribu atau sekitar 80,05% karena Perseroan mengajukan utang ke lembaga keuangan bukan bank senilai Rp1.347.897.302 ribu yang akan digunakan untuk pembangunan ruas tol-tol baru.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.743.786.951 ribu, meningkat sebesar Rp3.442.777.394 ribu atau 80,05% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.301.009.557 ribu. Peningkatan ini disebabkan karena adanya utang obligasi dan utang lembaga keuangan bukan bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun terutama masing-masing sebesar Rp1.477.377.192 ribu dan Rp1.347.897.302 ribu.

Utang kontraktor meningkat Rp663.643.392 ribu atau 66,49% dari Rp998.080.943 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi Rp1.661.724.335 ribu pada 31 Desember 2015 yang disebabkan karena meningkatnya aktivitas konstruksi jalan tol sehubungan dengan pembangunan ruas-ruas tol baru.

Beban akrual Perseroan meningkat sebesar Rp36.506.128 ribu atau 11,39% dari Rp320.441.733 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi Rp356.947.861 ribu pada 31 Desember 2015. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya beban bunga utang bank sindikasi, beban bunga utang obligasi serta beban bunga utang lembaga keuangan bukan bank serta beban nilai tambah liabilitas pembebasan tanah.

Utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun naik sebesar Rp468.035.406 ribu atau 71,6% dari sebesar Rp653.660.986 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi Rp1.121.696.392 ribu pada 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015, Perseroan memperoleh pinjaman modal kerja dari pihak berelasi.

Utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun meningkat sebesar Rp1.477.377.192 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya obligasi JORR II Tahun 2005 Tranche A sebesar Rp78,3 miliar yang akan jatuh tempo pada 2 Januari 2016. Obligasi ini adalah Obligasi Jasa Marga XII Seri Q sebesar Rp1 triliun yang akan jatuh tempo pada 6 Juli 2016, serta Obligasi Berkelanjutan I Seri S (B) sebesar Rp 400 miliar yang akan jatuh tempo pada 27 September 2016.

Liabilitas pembebasan tanah yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun turun sebesar Rp381.383.171 ribu atau 25,41% dari sebesar Rp1.500.719.209 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp1.119.336.038 ribu pada 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan karena pelunasan utang Badan Layanan Usaha ("BLU") pada ruas-ruas yang telah beroperasi.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp16.612.531.070 ribu, meningkat sebesar Rp74.307.305 ribu atau 0,45% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp16.538.223.765 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman kepada pihak ketiga guna mendukung kegiatan konstruksi ruas-ruas tol baru yang sedang dilaksanakan Perseroan melalui Entitas Anak. Selain itu, terdapat liabilitas yang merupakan dana talangan pembelian tanah untuk pembangunan ruas tol baru.

Utang bank meningkat sebesar Rp818.211.122 ribu atau 12,62% dari sebesar Rp6.484.840.290 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi Rp7.303.051.412 ribu pada 31 Desember 2015. Peningkatan ini terjadi terutama karena Perseroan memperoleh utang bank terutama dari pihak berelasi. Hal ini sejalan dengan adanya aktivitas konstruksi jalan tol baru.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp12.368.664.466 ribu, meningkat sebesar Rp1.347.935.145 ribu atau 12,23% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp11.020.729.321 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya saldo laba Perseroan sebesar RpRp975.182.025 ribu dari sebesar Rp 3.920.148.320 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp 4.895.330.345 ribu pada 31 Desember 2015.

HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Perbandingan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Pendapatan Usaha

Pendapatan Perseroan terdiri dari pendapatan tol dan usaha lainnya serta pendapatan konstruksi. Pendapatan usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp6.711.456.768 ribu, meningkat sebesar Rp2.596.334.532 ribu atau 63,09% dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp4.115.122.236 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan konstruksi hingga 424,89% atau sebesar Rp2.021.481.074 ribu. Di samping itu, pendapatan tol dan usaha lainnya juga meningkat sebesar Rp574.853.458 ribu atau 15,80% dari sebesar Rp3.639.352.831 ribu menjadi sebesar Rp4.214.206.289 ribu.

Pendapatan tol dan usaha lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp4.214.206.289 ribu, meningkat sebesar Rp574.853.458 ribu atau 15,79% dibandingkan dengan pendapatan tol dan usaha lainnya Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp3.639.352.831 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan dari ruas tol JORR Seksi Non S dan Cikampek-Padalarang. Pendapatan dari ruas tol JORR Seksi Non S meningkat sebesar Rp104.654.767 ribu atau 26,74% dari sebesar Rp391.348.862 ribu menjadi Rp496.003.629 ribu. Sedangkan pendapatan dari ruas tol Cikampek Padalarang meningkat sebesar Rp102.995.232 ribu atau 27,02% menjadi Rp484.189.932 ribu. Di samping itu, secara keseluruhan peningkatan ini terjadi karena meningkatnya volume lalu lintas transaksi dan penyesuaian tarif tol pada jalan tol milik Perseroan.

Pendapatan konstruksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.497.250.479 ribu, meningkat sebesar Rp2.021.481.074 ribu atau 424,89% dibandingkan dengan pendapatan konstruksi Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp475.769.405 ribu. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya aktivitas konstruksi pada ruas-ruas tol baru.

Beban Pendapatan

Beban pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp4.416.676.168 ribu, meningkat sebesar Rp2.171.632.233 ribu atau 96,73% dibandingkan dengan beban pendapatan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp2.245.043.935 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban konstruksi dengan signifikan sebesar Rp2.010.348.410 ribu setara 427,03% .

Beban tol dan usaha lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.935.555.463 ribu, meningkat sebesar Rp161.283.823 ribu atau 9,09% dibandingkan dengan beban tol dan usaha lainnya Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp1.774.271.640 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan provisi pelapisan ulang sebesar Rp 82.100.418 ribu atau 56,86% dari Rp144.386.567 menjadi Rp 226.486.985 ribu. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya aktivitas Perseroan dalam pelapisan ulang selama tahun 2016 .

Beban konstruksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.481.120.705 ribu, meningkat sebesar Rp2.010.348.410 atau 427,03% dibandingkan dengan beban konstruksi Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp470.772.295 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aktivitas pembangunan ruas-ruas tol baru.

Beban dan Pendapatan Lainnya

Penghasilan lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp126.921.847 ribu, menurun sebesar Rp32.374.662 ribu atau 20,32% dibandingkan dengan penghasilan lain-lain Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp159.296.509 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya penghasilan lainnya.

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp443.372.314 ribu, meningkat sebesar Rp39.829.090 ribu atau 9,87% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp403.543.224. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp38.451.541 ribu dari sebesar Rp249.628.821 ribu menjadi sebesar Rp288.080.362 ribu. Peningkatan beban gaji dan tunjangan disebabkan karena adanya kenaikan tarif upah berkala serta bertambahnya Entitas Anak khususnya di bidang jalan tol.

Biaya keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp744.944.677 ribu, meningkat sebesar Rp69.006.739 ribu atau 10,21% dibandingkan dengan biaya keuangan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp675.937.938 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban bunga atas utang lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp34.187.500 ribu atau 4.435,14% dari sebesar Rp770.833 menjadi Rp34.958.333 ribu untuk pembangunan ruas-ruas tol baru.

Beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp334.866.190 ribu, menurun sebesar Rp23.047.707 ribu atau 6,44% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp357.913.897 ribu. Beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 terdiri dari beban pajak kini sebesar Rp394.005.208 ribu dikurangi beban pajak tangguhan sebesar Rp59.139.018 ribu. Sedangkan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, beban pajak kini adalah sebesar Rp296.460.683 ribu dan beban pajak tangguhan sebesar Rp61.453.214 ribu.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp797.768.882 ribu, meningkat sebesar Rp206.355.835 ribu atau 34,89% dibandingkan dengan beban penghasilan komprehensif Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp591.413.047 ribu. Marjin penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan per 30 Juni 2016 adalah sebesar 11,89%, menurun dari marjin penghasilan tahun berjalan per 30 Juni 2015 sebesar 14,37%.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Pendapatan Usaha

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp9.848.242.050 ribu, meningkat sebesar Rp674.424.743 ribu atau 7,35% dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp9.173.817.307 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan tol dan usaha lainnya sebesar Rp402.892.107 ribu atau 5,57% dari sebesar Rp7.227.786.012 ribu menjadi sebesar Rp7.630.678.119 ribu. Selain itu, pendapatan konstruksi Perseroan juga meningkat sebesar Rp271.532.636 ribu atau 13,95% dari sebesar Rp1.946.031.295 ribu menjadi sebesar Rp2.217.563.931 ribu.

Pendapatan tol dan usaha lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.630.678.119 ribu, meningkat sebesar Rp402.892.107 ribu atau 5,57% dibandingkan dengan pendapatan tol dan usaha lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp7.227.786.012 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan tol dari ruas tol Ulujami – Kebon Jeruk dan ruas tol Jakarta – Cikampek. Pendapatan tol dari ruas tol Ulujami – Kebon Jeruk yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan PT Marga Lingkar Jakarta meningkat sebesar Rp128.998.890 ribu atau 218,51% dari Rp59.035.018 ribu menjadi sebesar Rp188.033.908 ribu. Sedangkan pendapatan tol dan usaha lainnya dari ruas Jakarta – Cikampek yang dioperasikan Perseroan meningkat sebesar Rp114.419.515 ribu atau 11,18% dari sebesar Rp1.023.430.461 ribu menjadi Rp1.137.849.976 ribu. Peningkatan ini terjadi karena volume lalu lintas transaksi meningkat sebesar 4,54% dari tahun 2014 sebesar 1.319,60 juta transaksi kendaraan menjadi 1.379,57 juta transaksi kendaraan. Di samping itu, peningkatan ini juga disebabkan karena adanya penyesuaian tarif tol pada jalan tol milik Perseroan. Ketentuan penyesuaian tarif telah ditetapkan dalam Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan Pasal 48 dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa operator jalan tol dapat menyesuaikan tarif setiap dua tahun sekali berdasarkan laju inflasi. Pada tahun 2015, beberapa Entitas Anak juga telah mulai berkontribusi terhadap pencapaian volume lalu lintas Perseroan, seperti Jalan Tol Bogor Ring Road seksi Sentul-Kedung Halang dan Kedung Halang-Kedung Badak, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto seksi Waru-Sepanjang, Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Semarang-Ungaran dan Ungaran-Bawen, Jalan Tol Bali- Mandara, Jalan Tol JORR W2 Utara seksi Kebon Jeruk-Cileduk dan Cileduk-Ulujami, serta yang terbaru diresmikan beroperasi pada 12 Juni 2015, yaitu Jalan Tol Gempol-Pandaan.

Pendapatan konstruksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.217.563.931 ribu, meningkat sebesar Rp271.532.636 ribu atau 13,95% dibandingkan dengan pendapatan konstruksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.946.031.295 ribu. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya aktivitas konstruksi pada ruas-ruas tol baru.

Beban Pendapatan

Beban pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.720.422.089 ribu, terdiri dari beban tol dan usaha lainnya sebesar Rp3.518.021.450 ribu dan beban konstruksi sebesar Rp2.202.400.639 ribu. Beban pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp236.596.684 ribu atau 4,31% dibandingkan dengan beban pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp5.483.825.405 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban konstruksi sebesar Rp281.333.205 ribu setara 14,64%.

Beban tol dan usaha lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.518.021.450 ribu, turun sebesar Rp44.736.521 ribu atau 1,26% dibandingkan dengan beban tol dan usaha lainnya selama tahun 2014 sebesar Rp3.562.757.971 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya beban penyusutan dan amortisasi Perseroan sebesar Rp116.927.691 ribu atau 14,73% dari Rp794.046.895 ribu selama 2014 menjadi Rp677.119.204 ribu pada tahun 2015. Beban penyusutan dan amortisasi Perseroan

turun karena perubahan metode perhitungan dari sebelumnya menggunakan *straight line method* menjadi *unit of usage method* yang berdasarkan volume lalu lintas.

Beban konstruksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.202.400.639 ribu, meningkat sebesar Rp281.333.205 ribu atau 14,64% dibandingkan dengan beban konstruksi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.921.067.434 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aktivitas pembangunan ruas-ruas tol baru.

Beban dan Pendapatan Lainnya

Penghasilan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp272.908.812 ribu, turun sebesar Rp14.948.796 ribu atau 5,19% dibandingkan dengan penghasilan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp287.857.608 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penghasilan bunga deposito Perseroan turun hingga Rp95.494.225 ribu atau 36,93% akibat dana yang ada sebagian besar dipindahkan ke jasa giro untuk digunakan sebagai pembayaran kontraktor.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp893.258.848 ribu, meningkat sebesar Rp8.416.052 ribu atau 0,95% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp884.842.796 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya biaya pajak, iuran dan retribusi sebesar Rp20.151.665 ribu atau 62,56% dari sebesar Rp32.212.751 ribu selama tahun 2014 menjadi Rp52.364.416 ribu selama tahun 2015 akibat adanya kenaikan dari beban pajak bumi dan bangunan (PBB).

Biaya keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.405.042.942 ribu, meningkat sebesar Rp189.722.687 ribu atau 15,61% dibandingkan dengan biaya keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.215.320.255 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban bunga sebesar Rp133.378.305 ribu atau 22,58% atas utang bank Perseroan dari Rp590.686.471 ribu menjadi sebesar Rp724.064.776 ribu. Selain itu, beban bunga dari utang lembaga keuangan bukan bank juga meningkat sebesar Rp34.207.014 ribu. Beban bunga atas obligasi juga meningkat sebesar Rp22.137.368 ribu atau 3,54% dari Rp624.633.784 ribu menjadi Rp646.771.152 ribu. Peningkatan utang digunakan untuk pembangunan ruas-ruas tol baru.

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp749.103.687 ribu, meningkat sebesar Rp135.456.549 ribu atau 22,07% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp613.647.138 ribu. Beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 terdiri dari beban pajak kini sebesar Rp585.399.690 ribu dan beban pajak tangguhan sebesar Rp163.703.997 ribu. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, beban pajak kini adalah sebesar Rp533.602.367 ribu dan beban pajak tangguhan sebesar Rp80.044.771 ribu.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.302.378.045 ribu, meningkat sebesar Rp122.162.858 ribu atau 10,35% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.180.215.187 ribu. Marjin penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar 13,22%, meningkat dari marjin penghasilan tahun berjalan per 31 Desember 2014 sebesar 12,87%.

POSISI ARUS KAS PERSEROAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp471.584.009 ribu, menurun 37,62% atau sebesar Rp284.383.491 dari posisi 30 Juni 2015. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan pembayaran bunga pinjaman.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.892.142.152 ribu, menurun 55% atau sebesar Rp671.568.295 dari posisi 30 Juni 2015. Penurunan tersebut disebabkan oleh penambahan hak pengusahaan jalan tol seiring dengan *progress* konstruksi jalan tol di Enitas Anak

Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.143.870.000 ribu, meningkat 3,361% atau sebesar Rp2.209.610.599 dari posisi 30 Juni 2015. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank di tahun 2016 sebesar Rp3.375.169.014

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.713.543.029 ribu, turun 11,99% atau sebesar Rp45.842.666 ribu dari posisi tahun 2014. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kas dari pendapatan tol sebesar Rp474.632.155 ribu atau 7,14% dari Rp6.646.392.546 ribu pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp7.121.024.701 ribu pada tahun 2015. Di samping itu, pembayaran kepada pemasok turun sebesar Rp304.678.813 ribu dari sebesar Rp1.954.389.874 ribu pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp1.649.711.061 ribu pada tahun 2015.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp4.012.954.887 ribu, meningkat 12,75% atau sebesar Rp453.767.580 ribu dari posisi tahun 2014. Hal ini disebabkan karena Perseroan melakukan penambahan investasi jangka panjang sebesar Rp472.046.200 ribu. Selain itu Perseroan juga melakukan penambahan hak pengusahaan jalan tol sebesar Rp39.122.268 ribu.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp2.331.849.283 ribu, meningkat 47,91% atau sebesar Rp755.325.328 ribu dari posisi tahun 2014 sebesar Rp1.576.523.955 ribu. Hal ini disebabkan karena Perseroan memperoleh kas yang berasal dari bank dan pinjaman lembaga keuangan bukan bank masing-masing sebesar Rp711.766.984 ribu dan Rp1.349.281.896 ribu.

LIKUIDITAS

Rasio lancar Perseroan, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aktiva lancar dengan jumlah liabilitas lancar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 45,56%, 48,16% dan 82,44%.

Rasio kas Perseroan, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas lancar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 36,49%, 42,91% dan 76,51%.

SOLVABILITAS

Tingkat Solvabilitas Perseroan dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 200,07%, 196,92% dan 189,09%

Tingkat Solvabilitas Perseroan dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aktiva untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 66,67%, 66,32% dan 65,41%

Angka-angka di atas menunjukkan rata-rata solvabilitas yang stabil sehingga risiko Solvabilitas Perseroan menjadi relatif kecil karena seluruh aset Perseroan memiliki kualitas dan likuiditas yang baik.

IMBAL HASIL EKUITAS DAN IMBAL HASIL INVESTASI

Imbal Hasil Ekuitas atau *Return On Equity* (ROE) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar 6,91%, 11,86% dan 12,90%.

Imbal Hasil Investasi atau *Return On Asset* (ROA) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aktiva yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aktiva.

Imbal Hasil Investasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar 2,30%, 3,99% dan 4,46%

BELANJA MODAL

Pada tahun 2016, belanja modal diperkirakan mencapai Rp 13,89 triliun atau meningkat 234,07% dibandingkan belanja modal pada tahun 2015. Belanja modal ini sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembangunan proyek baru. Realisasi belanja modal pada tahun 2015 mencapai Rp 4,16 triliun, menurun dibanding dengan Rp 4,78 triliun pada tahun 2014.

Kebijakan Perseroan untuk belanja modal antara lain sebagai berikut:

- Untuk belanja modal yang sifatnya rutin, maka dibiayai melalui sumber dana internal Perseroan, yaitu dari pendapatan operasi.
- Untuk belanja modal yang sifatnya non rutin dan berskala besar, diupayakan menggunakan sumber dana internal. Dan apabila dana dari sumber internal tidak mencukupi, maka dibiayai melalui dana eksternal yaitu utang perbankan atau utang Obligasi.

Pada Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan pengikatan untuk pembelian barang modal. Perseroan juga memiliki kebijakan untuk tidak melakukan pembelian belanja modal dalam bentuk valuta asing, sehingga tidak diperlukan adanya transaksi lindung nilai.

MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka menerapkan kebijakan Risiko, Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*.
2. Risiko harus dipahami sebagai semua peristiwa yang mungkin dapat terjadi dalam proses bisnis Perusahaan dalam pencapaian sasaran bisnisnya.
3. Semua risiko Perusahaan harus dikelola secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya Perusahaan sehingga tetap berada dalam batas Toleransi Risiko Perusahaan.

4. Direksi, seluruh Karyawan dan Mitra Usaha Perusahaan memiliki peran dalam pengelolaan risiko sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

Menyempurnakan sistem pengelolaan risiko secara terus menerus sesuai kondisi terkini dan mendorong seluruh Karyawan untuk selalu mengembangkan dan memelihara budaya sadar risiko dalam rangka menjaga nilai Perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan.

Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Investasi
2. Risiko Penyesuaian Tarif (Keterlambatan dan Kenaikan Besaran Tarif Tidak Sesuai Undang-Undang)
3. Risiko Perubahan Peraturan
4. Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia
5. Risiko Volume Lalu Lintas Tidak Sesuai Perkiraan Awal
6. Risiko Perubahan Suku Bunga
7. Risiko Terputusnya Konstruksi Jalan Tol
8. Risiko Kehilangan Pendapatan Akibat Perselisihan dengan Pihak Lain

Risiko Terkait Kepemilikan Saham

Di samping risiko yang dihadapi oleh Perseroan, kegiatan usaha dan industri Perseroan, kepemilikan saham mengandung risiko-risiko di bawah ini:

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham.
2. Harga Saham Perseroan dapat berfluktuasi.
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut
4. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan datang mungkin terbatas.
5. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen Wajar tanpa Modifikasi tertanggal 26 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode enam bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Maret 1978, dengan nama, "PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)", yang kemudian diubah berdasarkan Akta No.187 tanggal 19 Mei 1981 dan nama Perseroan diubah menjadi "PT Jasa Marga (Persero)", keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No.Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Pebruari 1982 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No.766 dan No.767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No.1138 (untuk selanjutnya akta No.1 tanggal 1 Maret 1978 dan akta No.187 tanggal 19 Mei 1981 tersebut disebut "**Akta Pendirian**"). Pendirian Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.9 tahun 1969 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi UU, PP No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Jasa Marga (Persero) dan PP No.4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Surat Keputusan Menkeu RI No.90/KMK.06/1978 tanggal 27 Pebruari 1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Jalan Tol.

Privatisasi Perseroan melalui *Initial Public Offering* (IPO) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor No. 52 tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan PT. Jasa Marga Sejalan dengan Privatisasi Perseroan, telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, sehingga mulai tanggal 12 September 2007, Perseroan berganti nama menjadi PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 November 2007.

Perseroan telah menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan UU No. 40/2007 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-54231.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0074564.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Perusahaan Kotamadya Jakarta Timur No. 1845/RUB 0-04/XI/08 tanggal 13 November 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 12 Desember 2008, Tambahan Berita Negara Indonesia No. 27404 ("Akta No. 28/2008").

Sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga II Tahun 2014 Seri T sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, di mana telah disetujui perubahan pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036530.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 ("Akta No. 61/2015").

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61 tanggal 26 Maret 2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Berdasarkan Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Plt. Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036530.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 27 Maret 2015 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 1160/L dari BNRI tanggal 27 November 2015 Nomor: 95 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 60 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015 yang telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036360.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 27 Maret 2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 64 tanggal 27 April 2016 sebagaimana dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0053682.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 April 2016, serta Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Agustus 2016, di bawah Nomor: 139, dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta., susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Refly Harun
Komisaris	:	Boediarso Teguh Widodo
Komisaris	:	Agus Suharyono
Komisaris	:	Taufik Widjoyono
Komisaris	:	Muhammad Sapta Murti
Komisaris Independen	:	Sigit Widyanan

Direksi

Direktur Utama	:	Desi Arryani
Direktur Keuangan/Independen	:	Anggiasari
Direktur Operasi I	:	Muh Najib Fauzan
Direktur Operasi II	:	Subakti Syukur
Direktur Pengembangan	:	Hasanudin
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Christantio Prihambodo

Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 21 (dua puluh satu) Entitas Anak yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

Entitas Anak

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
Entitas Anak (Jalan Tol)				

	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
Entitas Anak (Jalan Tol)					
1.	PT Marga Sarana Jabar (MSJ)	Pengusahaan jalan tol Bogor Outer Ring Road	55,00%	2007	Beroperasi
2.	PT Trans Marga Jateng (TMJ)	Pengusahaan jalan tol Semarang-Solo	73,91%	2007	Beroperasi
3.	PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC)	Rencana Pengusahaan jalan tol Kunciran-Cengkareng	76,20%	2008	Belum Beroperasi
4.	PT Marga Trans Nusantara (MTN)	Rencana Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong	60,00%	2008	Belum Beroperasi
5.	PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)	Pengusahaan jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara	65,00%	2009	Beroperasi
6.	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)	Pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto	55,00%	1994	Beroperasi
7.	PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)	Rencana Pengusahaan jalan tol Gempol-Pasuruan	98,60%	2010	Belum Beroperasi
8.	PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)	Pengusahaan jalan tol ruas Gempol-Pandaan	91,17%	2011	Beroperasi
9.	PT Jasamarga Bali Tol (JBT)	Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	55,00%	2011	Beroperasi
10.	PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT)	Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	55,00%	2014	Belum Beroperasi
11.	PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)	Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi	59,99%	2015	Belum Beroperasi
12.	PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)	Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi-Kertosono	59,99%	2015	Belum Beroperasi
13.	PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)	Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cinere-Serpong	55,00%	2015	Belum Beroperasi
14.	PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)	Rencana Pengusahaan jalan tol ruas Batang-Semarang	60,00%	2016	Belum Beroperasi
15.	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)	Rencana Pengusahaan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda	55,00%	2016	Belum Beroperasi
16.	PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)	Rencana Pengusahaan jalan tol ruas Manado-Bitung	65,00%	2016	Belum Beroperasi
17.	PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)	Rencana Pengusahaan jalan tol ruas Pandaan-Malang	60,00%	2016	Belum Beroperasi
Entitas Anak (Non Jalan Tol)					
18.	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ)	Operator jalan tol JORR Jasa Konstruksi,	99,90%	2000	Beroperasi
19.	PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP)	Pemeliharaan Jalan Tol, Persewaan Kendaraan Tol	99,68%	2010	Beroperasi
20.	PT Jasamarga Properti (JMP)	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa terkait Properti	99,80%	2013	Beroperasi
21.	PT Jasa Layanan Operasi (JLO)	Layanan operasi jalan tol	99,90%	2015	Beroperasi

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

Umum

Perseroan telah melalui berbagai peristiwa dan perubahan penting dalam perjalannya usahanya. Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi juga memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Tahun 2004, peran otorisator dikembalikan kepada Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. Peran otorisator dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol dengan berorientasi pada kaidah-kaidah korporasi. Perubahan ini mendorong Perseroan untuk lebih fokus dalam mengembangkan bisnis jalan tol, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengoperasian jalan tol.

Dengan memperhatikan pengalaman Perseroan selama 38 tahun dan peluang bisnis dibidang pengembangan dan pengoperasian jalan tol, maka pada tanggal 1 Maret 2013, Perseroan melakukan upaya transformasi untuk menangkap peluang bisnis dengan mencanangkan visi menjadi perusahaan pengembang dan operator jalan tol terkemuka di Indonesia. Dengan visi yang baru, Perseroan akan terus meningkatkan hak pengusahaan jalan tol melalui akuisisi, tender dan inisiasi. Dari sisi pengoperasian, Perseroan juga terus melakukan peningkatan dan pelayanan serta upaya-upaya efisiensi. Selain itu, Perseroan juga berupaya meningkatkan pendapatan usaha melalui pengembangan usaha lain yang terkait dengan bisnis jalan tol.

Keunggulan Kompetitif

Kemampuan Perseroan untuk memberikan pelayanan yang unggul, jasa pelayanan yang lengkap, serta prospek usaha yang berkesinambungan berkaitan langsung dengan keunggulan-keunggulan kompetitifnya yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mitra yang menarik dalam investasi Jalan Tol di Indonesia
2. Menguasai Jalan Tol yang menguntungkan dan konsesi yang panjang
3. Kondisi Keuangan Yang Cukup Kuat
4. Manajemen berpengalaman dengan komitmen pada Tata Kelola Perusahaan
5. Jaringan Jalan Tol yang panjang dan terdiversifikasi

Kegiatan usaha

Kegiatan usaha Perseroan adalah mengembangkan dan mengoperasikan jalan tol milik Perseroan. Hingga saat ini, melalui 9 (sembilan) Cabang dan 17 (tujuh belas) Anak Perusahaan di bidang usaha jalan tol, Perseroan adalah pemegang konsesi untuk 30 ruas jalan tol yang 19 ruas di antaranya dengan panjang ± 593 km telah beroperasi (61% dari total panjang jalan tol yang beroperasi di Tanah Air).

Secara garis besar, perkembangan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Ruas Jalan Tol yang Dikelola Perseroan

Saat ini, dari total 30 konsesi ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan, 16 ruas telah beroperasi secara penuh dan 3 ruas baru beroperasi sebagian, sedangkan 11 ruas lainnya masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Panjang Jalan Tol yang telah dan akan dioperasikan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

NO	RUAS JALAN TOL	CABANG/ANAK PERUSAHAAN	PANJANG KONSESI JALAN TOL (KM)	KETERANGAN
1	Jakarta-Bogor-Ciawi	Jagorawi	59,00	Beroperasi Penuh
2	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	33,00	Beroperasi Penuh
3	Ulujami-Pondok Aren	JLJ	5,55	Beroperasi Penuh
4	Jakarta Inner Ring Road (JIRR)	Cawang-Tomang-Cengkareng	23,55	Beroperasi Penuh
5	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	Cawang-Tomang-Cengkareng	14,30	Beroperasi Penuh
6	Jakarta Outer Ring Road (JORR)	JLJ	28,27	Beroperasi Penuh
7	JORR W2 Utara	MLJ	7,70	Beroperasi Penuh
8	Cengkareng-Kunciran	MKC	14,19	Beroperasi Penuh
9	Kunciran-Serpong	MTN	11,19	Belum Beroperasi
10	Cinere-Serpong	CSJ	10,14	Belum Beroperasi
11	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	83,00	Beroperasi Penuh
12	Cikampek-Padalarang	Purbaleunyi	58,50	Beroperasi Penuh
13	Padalarang-Cileunyi	Purbaleunyi	64,40	Beroperasi Penuh
14	Palimanan-Kanci	Palikanci	26,30	Beroperasi Penuh
15	Bogor Outer Ring Road (BORR)	MSJ	11,00	Beroperasi Sebagian
16	Belawan-Medan-Tanjung Morawa	Belmera	42,70	Beroperasi Penuh
17	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	JKT	61,70	Belum Beroperasi
18	Semarang Seksi A,B,C	Semarang	24,75	Beroperasi Penuh
19	Semarang-Solo	TMJ	72,64	Beroperasi Sebagian
20	Solo-Ngawi	SNJ	90,10	Belum Beroperasi
21	Ngawi-Kertosono	NKJ	87,02	Belum Beroperasi
22	Semarang-Batang	JSB	75,00	Belum Beroperasi
23	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	49,00	Beroperasi Penuh
24	Gempol-Pasuruan	TJP	34,15	Belum Beroperasi
25	Surabaya-Mojokerto	JSM	36,27	Beroperasi Sebagian
26	Gempol-Pandaan	JPT	13,61	Belum Beroperasi
27	Pandaan-Malang	JPM	37,62	Belum Beroperasi

NO	RUAS JALAN TOL	CABANG/ANAK PERUSAHAAN	PANJANG KONSESI JALAN TOL (KM)	KETERANGAN
28	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	JBT	10,00	Beroperasi Penuh
29	Balikpapan-Samarinda	JBS	99,35	Belum Beroperasi
30	Manado-Bitung	JMB	39,90	Belum Beroperasi
Total panjang tol yang telah dan akan dioperasikan oleh Perseroan			1.224	

B. Perkembangan Volume Lalu Lintas

Sebagian besar jalan tol yang dimiliki Perseroan telah menjadi jalur utama transportasi strategis bagi pengguna jalan, khususnya di wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya. Berikut adalah tabel volume lalu lintas transaksi per tahun:

(dalam juta kendaraan)

No	Ruas	Cabang/Anak Prshn	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ	2015	30 Juni 2016	
1	Jagorawi	Jagorawi	169,99	11,72%	189,92	5,10%	199,61	0,86%	201,32	1,41%	204,16	102,29	
2	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	176,35	10,50%	194,87	3,77%	202,21	1,94%	206,13	4,30%	215,00	110,87	
3	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	97,88	10,21%	107,88	4,76%	113,02	6,02%	119,83	6,34%	127,43	64,51	
4	Prof. Dr. Ir Sedyatmo	Cawang-Tomang-Cengkareng	66,54	8,36%	72,11	3,76%	74,82	2,15%	76,43	-0,36%	76,15	38,78	
5	Jakarta Inner Ring Road	Cawang-Tomang-Cengkareng	196,63	4,46%	205,4	1,40%	208,27	-0,91%	206,38	1,03%	208,51	106,10	
6	Padalarang-Cileunyi	Purbaleunyi	52,84	4,05%	54,98	5,55%	58,03	3,46%	60,04	0,08%	60,00	29,80	
7	Cikampek-Padalarang	Purbaleunyi	5,94	-10,16%	5,34	10,11%	5,88	7,31%	6,31	1,00%	6,25	3,21	
8	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	67,68	11,58%	75,51	8,18%	81,69	1,45%	82,87	8,07%	89,56	47,92	
9	Semarang	Semarang	37,72	20,02%	45,27	7,93%	48,86	-1,51%	48,12	4,75%	50,41	24,79	
10	Belmera	Belmera	19,49	11,25%	21,68	10,93%	24,05	5,56%	25,39	-2,32%	24,80	12,58	
11	Palikanci	Palikanci	16,59	16,44%	19,32	4,50%	20,19	-1,27%	19,93	15,60%	23,04	11,94	
12	JORR	JLJ	131,08	6,75%	139,93	4,85%	146,72	3,35%	151,63	5,11%	159,38	80,19	
13	Ulujami-Pondok Aren	JLJ	41,31	7,30%	44,33	5,82%	46,91	-3,79%	45,13	-3,09%	43,73	22,50	
14	BORR	MSJ	9,08	23,72%	11,24	11,39%	12,52	9,25%	13,68	12,11%	15,34	7,98	
15	Surabaya-Mojokerto	JSM	2,12	306,27%	8,62	30,63%	11,26	7,04%	12,05	8,03%	13,02	7,34	
7	Semarang-Solo	TMJ	0,52	852,40%	4,96	32,66%	6,58	136,47	%	20,48%	18,75	9,51	
17	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	JBT	-	-	-	-	3,29	335,54	%	14,31	15,56%	16,54	8,15
18	JORR W2 Utara	MLJ	-	-	-	-	-	14,49	70,58%	24,71	24,71	12,97	
19	Gempol-Pandaan	JPT	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80	2,71	
TOTAL			1.091,78	10,04%	1.201,37	5,21%	1.263,91	4,41%	1.319,60	4,54%	1.379,57	704,15	

C. Perkembangan Tarif Tol

Dengan berlakunya UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan-peraturan BPJT, penentuan tarif perdana dan penyesuaian tarif jalan tol dinegosiasikan antara pemegang konsesi dengan BPJT, dan berdasarkan rekomendasi BPJT, disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum. Besarnya tarif jalan tol dihitung berdasarkan kemampuan pengguna tol untuk membayar, penghematan biaya operasi pengguna jalan, risiko pemegang konsesi, tingkat keuntungan dan kelayakan investasi, yang didefinisikan sebagai estimasi biaya investasi terhadap proyeksi pendapatan selama periode konsesi. Pada masa lalu, negosiasi penetapan tarif jalan tol dilakukan setelah selesainya konstruksi jalan tol, sedangkan saat ini dilakukan bersamaan dengan proses persetujuan konstruksi jalan tol dan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum. Penyesuaian tarif jalan tol dapat dilakukan setiap dua tahun oleh BPJT berdasarkan tarif yang berlaku, dengan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum, dengan memperhitungkan faktor inflasi dengan menggunakan formula standar yang telah ditentukan: tarif tol baru = tarif sebelumnya x (1 + tingkat inflasi). Dengan diterapkannya mekanisme ini, diharapkan pengaruh pertimbangan politis dalam penetapan tarif jalan tol dapat dihindari, sehingga memungkinkan pemegang konsesi jalan tol dapat menerima penyesuaian tarif jalan tol secara berkala.

D. Perkembangan Pendapatan Tol

Kontribusi terbesar pendapatan tol berasal dari ruas jalan tol Jakarta-Cikampek yang mencapai Rp1,137 triliun atau 15,98% dari total Pendapatan Tol secara keseluruhan, sedangkan ruas-ruas yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya masih penyumbang terbesar pendapatan yang diperoleh Perseroan. Tahun 2015 total pendapatan tol yang berasal dari ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta (Jakarta Inner Ring Road) mencapai Rp791 miliar dengan kontribusi sebesar 11,11% dari total keseluruhan pendapatan tol.

Berikut adalah perkembangan pendapatan tol yang dikelola oleh Perseroan:

No	Ruas	Cabang/Anak Prshn	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ	2015	30 Juni 2016
1	Jagorawi	Jagorawi	428,8	18,5%	508,1	7,9%	548,2	10,8%	607,5	2,1%	620,2	343,2
2	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	806,8	11,1%	896,2	8,9%	976,6	4,8%	1.023,4	11,2%	1.137,8	596,6
3	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	323,7	17,3%	379,6	7,5%	408,0	14,5%	467,1	8,7%	507,5	287,6
4	Prof. Dr. Ir Sedyatmo	Cawang-Tomang-Cengkareng	360,8	7,7%	388,8	8,8%	423,2	8,2%	458,0	-0,5%	455,6	234,8
5	Jakarta Inner Ring Road	Cawang-Tomang-Cengkareng	585,7	15,2%	674,8	1,8%	686,8	9,8%	754,3	4,9%	791,4	454,5
6	Padalarang-Cileunyi	Purbaleunyi	219,4	22,8%	269,5	2,5%	276,3	23,0%	339,9	-2,9%	330,3	177,2
7	Cikampek-Padalarang	Purbaleunyi	588,5	11,4%	655,4	13,1%	741,1	12,8%	835,9	3,7%	867,3	484,1
8	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	206,2	16,8%	240,8	12,3%	270,5	14,2%	309,0	8,7%	335,8	200,0
9	Semarang	Semarang	79,8	21,9%	97,2	7,8%	104,8	1,6%	106,5	6,3%	113,2	65,6
10	Belmera	Belmera	62,2	17,6%	73,2	11,4%	81,6	11,9%	91,3	-1,3%	90,2	51,8
11	Palikanci	Palikanci	82,5	21,9%	100,5	6,9%	107,5	4,6%	112,4	18,3%	133,0	80,0
12	JORR	JLJ	959,7	14,6%	1.100,2	-13,9%	946,4	12,0%	1.059,7	-0,9%	1.050,4	508,9

No	Ruas	Cabang/Anak Prshn	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ	2015	30 Juni 2016
13	Uluji-Pondok Aren	JLJ	103,9	11,2%	115,6	14,1%	131,9	-7,0%	122,7	-7,7%	113,3	77,0
14	BORR	MSJ	29,1	41,3%	41,1	10,9%	45,6	47,4%	67,2	29,4%	86,9	46,2
15	Surabaya-Mojokerto	JSM	3,3	309,7%	13,4	30,9%	17,6	6,8%	18,8	7,2%	20,1	15,2
7	Semarang-Solo	TMJ	2,9	859,7%	27,5	32,9%	36,5	194,0%	107,3	20,7%	129,5	70,7
17	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	JBT	-	-	-	-	23,7	347,7%	106,1	15,6%	122,7	66,4
18	JORR W2 Utara	MLJ	-	-	-	-	-	-	59,0	218,5%	188,0	90,6
19	Gempol-Pandaan	JPT	-	-	-	-	-	-	-	-	27,8	27,7
TOTAL			4.843,3	15,2%	5.581,8	4,4%	5.825,9	10,5%	6.646,4	7,1%	7.121,0	3.878,9

Sumber: Perseroan, Q2 2016

E. Perkembangan Pendapatan Non Tol

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, Perseroan melakukan pengembangan usaha non tol yang terkait dengan pengembangan dan pengoperasian jalan tol melalui optimalisasi aset pada koridor jalan tol dan pengembangan bisnis dengan memanfaatkan kompetensi Perseroan. Kerja sama usaha non tol ini dilakukan baik secara mandiri atau dikerjasamakan dengan mitra strategis.

Pada tahun 2015, Pendapatan Non Tol didominasi oleh Pendapatan BBM SPBU yang diperoleh dari pengoperasian SPBU disepanjang jalan tol milik Perseroan. Disamping itu pengembangan rest area di ruas-ruas jalan tol juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan dalam bentuk Pendapatan Sewa Lahan.

Berikut adalah perkembangan pendapatan non tol Perseroan:

No	Keterangan	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ	2015	30 Juni 2016
1	Sewa Lahan	58,40	28,8%	75,23	19,7%	90,06	15,9%	104,36	18,4%	123,54	64,32
2	Pendapatan Iklan	14,26	-59,5%	5,78	16,3%	6,72	-6,1%	6,31	-4,0%	6,06	2,79
3	Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain	10,87	101,7%	21,93	47,7%	32,41	210,4%	100,60	-86,4%	13,66	98,92
4	Pendapatan BBM SPBU	-	-	-	-	153,07	16,8%	178,71	14,5%	204,56	91,30
5	Lainnya	62,78	-35,4%	40,53	457,5%	225,94	-15,3%	191,41	-15,5%	161,83	77,95
Total		146,31	-1,9%	143,47	254,2%	508,20	14,4%	581,39	-12,3%	509,65	335,30

Sumber: Perseroan, Q2 2016

Operasi dan Manajemen Jalan Bebas Hambatan

Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan pengembang dan operator jalan tol terkemuka di Indonesia, Perseroan melakukan langkah-langkah strategis agar dapat mempertahankan eksistensi posisinya di industri jalan tol yang saat ini telah semakin berkembang dengan adanya operator-operator lain sebagai pesaing baru.

Langkah-langkah strategis ini tentunya harus didukung dengan peningkatan pelayanan yang tercermin dari kepuasan pelanggan (pengguna jalan tol) dan masyarakat. Terkait peningkatan pelayanan, Perseroan terus berupaya untuk mempertahankan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendirikan pusat layanan terpadu atau lebih dikenal dengan Jasa Marga *Traffic Information Center* (JMTIC), dan program peningkatan layanan kepada konsumen melalui penyediaan kamera CCTV, penempatan *Variable Messaged Sign* (VMS) pada lokasi-lokasi strategis, pembentukan Jasa Marga *Traffic Information Center* (JMTIC), dan penerapan sistem transaksi elektronik melalui penggunaan e-Toll Card.

A. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol

Sebagai upaya untuk mempertahankan kualitas jalan sehingga tetap nyaman dipakai pengguna jalan, Perseroan secara terus-menerus mempertahankan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Jalan Tol. SPM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.392/PR/T/M/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol adalah ukuran yang harus dicapai oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan tol

Perseroan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. Pemenuhan standar ini diperlukan sebagai syarat kenaikan tarif jalan tol yang mulai diberlakukan tanggal 28 September 2009. Namun, bagi Perseroan menjaga kerataan jalan dan aspek penting lainnya dalam keamanan dan kenyamanan di jalan tol merupakan komitmen dan bentuk tanggung jawab Perusahaan yang wajib dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen pengguna jalan.

SPM meliputi substansi pelayanan sebagai berikut:

1. Kondisi jalan
2. Kecepatan tempuh rata-rata
3. Aksesibilitas
4. Mobilitas
5. Keselamatan
6. Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan

B. Program Peningkatan Layanan kepada Konsumen *Electronic Payment*

Salah satu langkah maju yang diambil untuk menunjang Perseroan tahun 2009 adalah memasyarakatkan penggunaan *electronic toll card* atau *e-TollCard* yang dapat dipakai untuk membayar tol. Grand launching produk *e-Toll Card* dilakukan tanggal 30 Januari 2009, setelah dilakukan *soft launching* 15 Desember 2008. Kartu elektronik tersebut diluncurkan atas hasil kerja sama antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan menggunakan kartu tol, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi menjadi lebih cepat, yaitu dari 7 detik secara manual menjadi 3 detik.

Hingga akhir Juni 2016, tingkat penggunaan *e-Toll Card* pada ruas-ruas yang telah mengimplementasikan *e-Toll Card* adalah sekitar 22% dari total transaksi Perseroan.

Komitmen Perseroan untuk terus melakukan upaya-upaya modernisasi juga tercermin dari peluncuran *dedicated lane e-Toll Pass* pada tanggal 01 Oktober 2012. Sebagai pengembangan dan generasi selanjutnya dari teknologi *e-Toll Card*, pengguna jalan tol dengan *e-Toll Pass* tidak perlu lagi berhenti ketika bertransaksi di gardu tol. Hal ini dimungkinkan dengan memasang *e-Toll Card* pada alat bernama *On Board Unit* (OBU) yang diletakkan pada bagian kaca depan kendaraan, sehingga pada saat OBU menerima sinyal dari alat yang berada pada gardu tol otomatis, saldo *e-Toll Card* berkurang secara otomatis dan barrier terbuka.

C. *Closed Circuit Television*

Perseroan telah mengaplikasikan kamera pemantau atau CCTV di sejumlah tempat, khusus di tempat-tempat titik rawan macet agar masyarakat dapat mengantisipasi kemana jalur yang bisa dilalui. Kehadiran CCTV dapat memberikan informasi secara *real time* kepada pengguna kendaraan mengenai kondisi jalan tol, sehingga pengendara dapat mencari alternatif lain. Sistem CCTV yang dipasang di ruas jalan tol yang dikelola, diintegrasikan seluruhnya dengan yang sudah terpasang di ruas jalan tol yang lain, dengan menggunakan IP camera (*internet protocol camera*) dan *wireless LAN* (*local area network*). Di samping itu, seluruh jaringan CCTV yang sudah terpasang diintegrasikan sehingga saling terkoneksi.

D. Pusat Layanan Informasi Kondisi Lalu Lintas Jalan Tol

Dengan pendirian JMTIC, diharapkan terjadinya peningkatan kepuasan pelanggan melalui pelayanan terpadu yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus menciptakan peningkatan *image* Perseroan serta mempermudah Perseroan untuk mendeteksi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan operasional jalan tol. Fungsi utama JMTIC adalah sebagai berikut:

- Menyediakan pusat layanan informasi kondisi lalu lintas dan pengaduan yang dapat diakses dengan mudah.
- Memudahkan pelanggan menyampaikan berbagai keluhan dan informasi lainnya yang perlu mendapat tanggapan yang cepat dari Perseroan untuk memuaskan pelanggan.
- Memudahkan pelanggan menyampaikan kebutuhan, keinginan dan saran atas jasa yang diberikan oleh Perseroan sebagai masukan dalam pengembangan di masa mendatang

Perseroan juga menyediakan layanan interaktif yang dapat diterima secara *real time* melalui <http://www.jasamargalive.com> dan <http://m.jasamargalive.com> untuk telepon seluler, serta akun mikroblog Twitter yaitu @PTJASAMARGA.

E. Keselamatan Berkendaraan

Perseroan secara terus-menerus melakukan kampanye untuk berkendara dengan selamat untuk menghindari kecelakaan. Data Perseroan menunjukkan kecelakaan yang paling banyak terjadi di jalan tol adalah di jalan tol Jakarta-Cikampek dan kedua di jalan tol Jagorawi. Dari jumlah kecelakaan yang terjadi, faktor pengemudi masih menjadi penyebab utama kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Faktor kedua yang menjadi penyebab kecelakaan adalah pecah ban. Diharapkan kedepan kecelakaan dapat diminimalisasi dengan gencarnya publikasi dan sosialisasi keselamatan dalam berkendara yang dilakukan oleh Perseroan maupun instansi lain.

Proses Tender Perolehan Ruas Jalan Tol

Dengan berlakunya UU No.38/2004 juncto PP No.15/2005, serta Permen PU No. 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol yang disempurnakan melalui Permen PU No. 21/PRT/M/2012, Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya proses penawaran (lelang) akan menjadi kunci sukses berjalannya pembangunan konstruksi dan beroperasinya hak pengusahaan baru untuk jalan tol. Karena prasyarat dan ketentuan untuk menentukan pemberian hak pengusahaan seperti struktur tarif, adalah bersifat tetap saat dokumen penawaran diterima oleh Pemerintah dan operator yang mendapatkan hak pengusahaan memiliki kemampuan yang terbatas dalam melakukan perubahan pada prasyarat dan kondisi selama masa pembangunan konstruksi atau fase pengoperasian konsesi jalan tol. Oleh sebab itu, forecast terhadap pendapatan dan beban menjadi sangat penting dalam tahap seleksi dan penawaran (lelang) sehingga Perseroan dapat secara tepat mengidentifikasi dan mengenali risiko potensial yang mungkin timbul. Perseroan memiliki keahlian dalam mempersiapkan studi kelayakan yang akan digunakan dan dengan dibantu konsultan traffic untuk mengevaluasi volume lalu lintas dari konsesi jalan tol akan dapat membantu Perseroan dalam memperkirakan risiko yang berhubungan dengan volume lalu lintas sepanjang proses seleksi dan penawaran. Perseroan juga mempersiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses penawaran, meliputi persiapan analisis dan studi kelayakan, perhitungan volume lalu lintas yang dituangkan dalam presentasi penawaran.

Sesuai ketentuan dalam dokumen lelang, akan didirikan anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Perseroan untuk membangun dan mengoperasikan pengusahaan jalan tol tersebut. Pada langkah ini Perseroan dapat menawarkan kepada Swasta, BUMN dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk menjadi bagian dalam proyek jalan tol baik sebagai pengembang, investor atau pemegang saham minoritas dalam pendirian anak perusahaan. Perseroan berkeyakinan bahwa partisipasi Pemerintah Daerah pada kegiatan operasional hak pengusahaan jalan tol akan sangat membantu Perseroan, khususnya dalam tahap pembebasan lahan untuk proyek jalan tol.

Anak perusahaan yang dimaksud di atas adalah merupakan Perseroan yang berbadan hukum dengan hak dan kewajiban menjalankan perjanjian pengusahaan. Pada prakteknya Perseroan yang akan melakukan manajemen proyek atas nama anak perusahaan dan juga akan mengoperasikan jalan tol. Setiap manajemen anak perusahaan akan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap proses konstruksi, termasuk pertemuan dengan kontraktor ataupun pihak ketiga lainnya

Perjanjian Pengelolaan Jalan Tol (PPJT) Perseroan

A. Hak Pengusahaan Jalan Tol yang Telah Beroperasi

Masing-masing dari ke-13 (tiga belas) PPJT untuk jalan tol yang telah dioperasikan Perseroan sebelum 2004 (jalan tol yang dioperasikan oleh cabang dan JLJ), seluruhnya ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2006 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2005 dan masa hak pengusahaannya akan berakhir tanggal 31 Desember 2044.

Seluruh jalan tol yang saat ini hak pengusahaannya dimiliki oleh Perseroan dan telah beroperasi, dikelola dan dioperasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PPJT yang dibuat antara Perseroan dengan Pemerintah. Menurut PPJT, jalan tol tetap menjadi milik Pemerintah oleh karenanya setelah berakhirnya masa hak pengusahaan atau berakhirnya PPJT, Perseroan harus mengembalikan dan menyerahkan kembali jalan tol kepada BPJT. Selama masa hak pengusahaan, Perseroan memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol. Perseroan juga berhak atas seluruh pendapatan tol maupun pendapatan non-tol dari kegiatan lainnya seperti penyewaan ruang iklan atau *billboard*. Perseroan juga bertanggung jawab atas seluruh biaya dan kewajiban yang timbul yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta diwajibkan untuk mengoperasikan dan memelihara jalan tol sesuai dengan PPJT dan peraturan serta ketentuan Pemerintah yang berlaku.

B. Restrukturisasi JORR dan Hak Pengoperasian Sementara JORR Seksi S

Pembangunan JORR dimulai pada tahun 1992 dengan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan antara Perseroan (dulunya sebagai regulator) dengan beberapa perusahaan jalan tol: PT Marga Nurindo Bhakti (MNB), PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP) dan PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP). Konstruksi proyek JORR termasuk konstruksi JORR Seksi S oleh MNB yang belum diselesaikan saat proyek ini masuk ke pengadilan pada bulan Juni 1997 terkait perkara korupsi yang dilakukan salah satu direktur MNB dan salah satu direktur PT Utama Karya (Persero) yang merupakan anggota konsorsium dalam pembangunan JORR Seksi S. Pada saat yang sama, beberapa bank di Indonesia yang telah memberikan pinjaman sindikasi kepada MNB (dimana PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai *facility agent*) dialihkan pada BPPN akibat krisis keuangan di Asia.

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan Berupa Hak Konsesi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”) Nomor 02/BA/M/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Berita Acara Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, telah diserahkan Hak Konsesi Jalan Tol JORR S kepada PT Utama Karya (Persero).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 106/KPTS/M/2016 tentang Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”) oleh PT Utama Karya (Persero), Hak Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”) oleh PT Utama Karya (Persero) dengan masa konsesi selama 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan sejak Keputusan tersebut ditetapkan.

C. Hak Pengusahaan Jalan Tol Baru

Pada tanggal 6 Mei 2010, telah dilakukan *spin-off* atau pemisahan PPJT ruas JORR W2 Utara dari Perseroan kepada anak perusahaan PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan atas *sharing risk* dan percepatan pembebasan tanah.

Secara keseluruhan, dari tahun 2005 hingga sekarang Perseroan melalui entitas anak telah memperoleh hak pengusahaan atas 17 ruas tol baru. Dari 17 ruas tol baru tersebut, 3 diantaranya telah beroperasi secara penuh yaitu ruas JORR W2 Utara (7,7 Km), ruas Gempol-Pandaan (13,6 Km), dan ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 Km). Sementara itu tiga ruas tol baru lainnya beroperasi sebagian karena beberapa seksi masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, yaitu ruas tol Semarang-Solo (telah beroperasi 23,1 Km dari total 72,6 Km), ruas Bogor Outer Ring Road (telah beroperasi 5,8 Km dari total 11 Km), ruas tol Surabaya-Mojokerto (telah beroperasi 2,3 Km dari total 36,3 Km). Terakhir, 11 dari 17 proyek ruas tol baru masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, yaitu ruas Gempol-Pasuruan (34,1 Km), JORR 2 Cengkareng-Kunciran (14,1 Km), JORR 2 Kunciran-Serpong (11,1 Km), ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (61,7 Km), Solo-Ngawi (90,1 Km), Ngawi-Kertosono (87 Km), Cinere-Serpong (10,2 Km), Batang-Semarang (75 Km), Pandaan-Malang (37,6 Km), Balikpapan-Samarinda (99,3 Km) dan Manado-Bitung (39,9 Km).

D. Kebijakan Pengadaan Tanah

Pada bulan Juni 2007, Perseroan membuat kesepakatan dengan Badan Layanan Umum (“BLU”) BPJT, dimana BLU menyetujui untuk memberikan dana talangan atas biaya pengadaan lahan masing-masing hingga Rp127 miliar, Rp100 miliar dan Rp80 miliar untuk proyek jalan tol Semarang-Solo, Gempol-Pasuruan dan *Bogor Ring Road*. Saat diselesaikannya pengadaan lahan tersebut dan tersedianya suatu lahan yang cukup untuk konstruksi suatu bagian (segmen) ruas jalan tol, Perseroan diwajibkan untuk melakukan penggantian (*reimbursement*) kepada BLU untuk seluruh dana yang telah dipergunakan untuk pengadaan lahan suatu bagian (segmen) ruas jalan tol, serta pembayaran bunga atas pendanaan yang digunakan berdasarkan tingkat bunga Lembaga Penjaminan Simpanan ditambah dengan 1% per tahun, yang dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan penyelesaian pembebasan tanah. Setelah menerima penggantian (*reimbursement*) dari Perseroan, BLU akan menyerahkan lahan yang telah dibebaskan tersebut dalam waktu 7 hari kerja. Ketentuan dalam perjanjian ini berlaku 24 bulan sejak Juni 2007, atau Juni 2009. Perjanjian dana bergulir BLU untuk ruas Bogor Ring Road dan Semarang-Solo telah dialihkan kepada MSJ dan TMJ, sedangkan untuk ruas Gempol-Pasuruan sedang dalam proses pengalihan kepada TMJP.

Pada tanggal 16 Desember 2011, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang Undang No. 02 tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini telah pula ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 14 Januari 2012 sehingga telah berlaku efektif.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 59 Undang Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 07 Agustus 2012 telah disahkan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden (Perpres) yang terdiri dari 126 pasal ini mengatur tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil.

Persaingan Usaha

Untuk mendapatkan hak pengusahaan untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol baru, Perseroan juga bersaing dengan perusahaan lokal dan luar negeri.

Selain persaingan dalam mendapatkan hak pengusahaan, jalan tol memiliki persaingan usaha dengan moda transportasi lain, seperti transportasi udara dan kereta api. Namun demikian, sejauh ini moda transportasi kendaraan roda empat di Indonesia masih mendominasi dalam kegiatan transportasi penumpang dan transportasi domestik angkutan barang.

Berikut adalah gambaran jalan tol di Indonesia yang dimiliki oleh Perseroan serta yang dimiliki oleh perusahaan lain:

Panjang Jalan Tol yang telah dimiliki oleh Perseroan

NO	RUAS JALAN TOL	CABANG/ANAK PERUSAHAAN	PANJANG (KM)	PANGSA PASAR
1	Jakarta-Bogor-Ciawi	Jagorawi	59,00	6,07%
2	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	33,00	3,40%
3	Ulujami-Pondok Aren	JLJ	5,55	0,57%
4	Jakarta Inner Ring Road (JIRR)	Cawang-Tomang-Cengkareng	23,55	2,42%
5	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	Cawang-Tomang-Cengkareng	14,30	1,47%
6	Jakarta Outer Ring Road (JORR)	JLJ	28,27	2,91%
7	JORR W2 Utara	MLJ	7,70	0,79%
8	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	83,00	8,54%
9	Cikampek-Padalarang	Purbaleunyi	58,50	6,02%
10	Padalarang-Cileunyi	Purbaleunyi	64,40	6,63%
11	Palimanan-Kanci	Palikanci	26,30	2,71%
12	Bogor Outer Ring Road (BORR)	MSJ	5,80	0,60%
13	Belawan-Medan-Tanjung Morawa	Belmera	42,70	4,39%
14	Semarang Seksi A,B,C	Semarang	24,75	2,55%
15	Semarang-Solo	TMJ	23,10	2,38%
16	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	49,00	5,04%
17	Surabaya-Mojokerto	JSM	20,77	2,14%
18	Gempol-Pandaan	JPT	13,61	1,40%
19	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	JBT	10,00	1,03%
Total panjang tol yang telah dioperasikan oleh Perseroan			593,30	61,05%

Panjang Jalan Tol yang dimiliki oleh Perusahaan Lain

NO	RUAS JALAN TOL	PERUSAHAAN PENGELOLA	PANJANG (KM)	PANGSA PASAR
1	Tangerang-Merak	PT Marga Mandala Sakti	73,00	7,51%
2	Jakarta Harbor Road	PT Citra Marga Nusaphala	11,50	1,18%
3	Ir. Wiyoto Wiyono		15,50	1,59%
4	Ujung Pandang Tahap I	PT Bosowa Marga Nusantara	6,05	0,62%
5	Serpong-Pondok Aren	PT Bintaro Serpong Damai Tol	7,25	0,75%
6	SS Waru - Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	12,80	1,32%
7	JORR W1	PT Jalan Lingkar Barat	9,85	1,01%
8	Cikopo-Palimanan	PT Lintas Marga Sedaya	116,75	12,01%
9	Kanci-Pejagan	PT MNC	35,00	3,60%
10	Pejagan-Pemalang	PT Pejagan Pemalang Toll Road	20,20	2,08%
11	Jembatan Tol Suramadu	Pemerintah (Kementerian PU)	5,40	0,56%
12	Makassar Seksi 4	PT Jalan Tol Seksi Empat	11,60	1,19%
13	Surabaya-Gresik	PT Marga Bumi Mataraya	20,70	2,13%
14	Kertosono-Mojokerto	PT Marga Harjaya Infrastruktur	14,41	1,48%
15	Cinere-Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	3,70	0,38%
16	JORR Seksi S	PT Utama Karya	14,83	1,53%
Total panjang tol yang dioperasikan oleh Perusahaan lain			378,54	38,95%
Total panjang keseluruhan jalan tol yang telah beroperasi			971,84	100,00%

Properti

Sebagian besar dari aktiva yang digunakan oleh Perseroan tidak dimiliki oleh Perseroan. Pada umumnya, menurut PPJT, kepemilikan atas jalan tol Perseroan dan infrastruktur terkait seperti gerbang tol dan pos pengawasan tetap menjadi milik Pemerintah selama periode konsesi. Selama periode ini, Perseroan berhak untuk menggunakan jalan tol dan infrastruktur terkait yang terdiri atas aktiva konsesi dan berhak atas pendapatan yang diterima atas hal tersebut. Pada saat berakhirnya masa konsesi, Perseroan diharuskan untuk mengalihkan aktiva konsesi kepada Pemerintah tanpa kompensasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, diluar aktiva konsesi yang dimiliki, Perseroan juga memiliki aset tetap seluas 31.198 meter persegi di berbagai lokasi dengan dasar kepemilikan Hak Guna Bangunan dan Akta Jual Beli.

Peraturan Mengenai Lingkungan

Dalam pengoperasian hak pengusahaan jalan tol di Indonesia, Perseroan harus mematuhi prosedur administratif untuk mendapatkan izin lingkungan. Pekerjaan persiapan, konstruksi, operasi, dan pengembangan jalan harus melalui proses perijinan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Perijinan mengatur prasyarat, kondisi, pembatasan dan fungsi pengawasan untuk industri jalan tol.

AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Atas Lingkungan)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL²) adalah suatu analisa dampak lingkungan yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih jauh diatur oleh PP No.27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan. UU No.23 Tahun 1997 tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009, setiap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Tabel di bawah ini menunjukkan persetujuan/pengehasan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki Perseroan:

No	Ruas Jalan Tol	Nomor Pengehasan	Tanggal Pengehasan	Keterangan
1	Belmera (penambahan lajur tol Belmera)	KL.03.02-MN/492	9 Desember 1997	AMDAL
2	Palimanan-Cirebon	KL.03.02-MN/09	10 Januari 1995	AMDAL
3	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	KL.03.02-MN/09	10 Januari 1993	SEL
4	Jakarta-Cikampek	KL.03.02-MN/130	17 Maret 1993	SEL
5	Semarang Seksi C	KL.03.02-MN/178	28 April 1997	AMDAL
6	Semarang Seksi A + B	KL.03.02-MN/220	27 Mei 1993	SEL
7	Cawang-Grogol	KL.03.02-MN/37	1 Februari 1994	SEL
8	Surabaya-Gempol	KL.03.02-MN/393	6 September 1993	SEL
9	Grogol-Pluit	KL.03.02-MN/404	30 Agustus 1996	AMDAL
10	Ulujami-Pondok Aren	KL.03.02-MN/467	1 Nopember 1994	AMDAL
11	Padalarang-Cileunyi	KL.03.02-MN/481	10 Desember 1990	SEL
12	Jagorawi	KL.03.02-MN/57	7 Maret 1995	SEL
13	Kebun Jeruk-Pondok Pinang	KL.03.02-MN/372	21 Agustus 1996	AMDAL
14	Pondok Pinang-Jagorawi-Cikunir	KL.03.02-MN/259	19 Juli 1995	AMDAL
15	Cikampek-Cirebon	KL.03.02-MN/76	7 Maret 1996	AMDAL
16	Gempol-Mojokerto	KL.03.02-MN/10	16 Januari 1997	AMDAL
17	Cikampek-Padalarang	KL.03.02-MN/380		
		SK Gubernur Ja-Bar No.660.1/3579-BPLHD	31 Agustus 1994	AMDAL
18	Jalan Tol JORR	SK Menteri Lingkungan Hidup No.253/04		AMDAL
19	Bogor Ring Road	660/521-BPLHD	22 Februari 2007	AMDAL
20	Gempol-Pasuruan	560/1051/031/2007	11 Januari 2007	AMDAL
21	Peningkatan Jalan Tol Prof.Dr.Ir. Sedyatmo	167 tahun 2008	31 Maret 2008	AMDAL
22	W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami)	57/Andal/-1.774.151	22 Desember 2008	AMDAL
23	Semarang-Solo	665.1/15/2005	5 Oktober 2005	AMDAL
24	Pelebaran Jalan Tol Semarang Seksi A (Krapyak-Jatingaleh) Kota Semarang	660.1/A 0215	31 Juli 2007	AMDAL
25	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	Keputusan Gubernur No. 1545/04-B/HK/2011	4 Nopember 2011	ANDAL, RKL, RPL
26	Solo-Ngawi	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 653 tahun 2008	4 September 2008	
27	Ngawi-Kertosono	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 653 tahun 2008	4 September 2008	
28	Cinere-Serpong	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 653 tahun 2008	9 September 2008	
29	Medan-Kualanamu- Tebing Tinggi	Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1401/BLH-SU/BTL.A/2011	14 September 2011	ANDAL,RKL, RPL
		Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 660.1/207.II/2007	31 Januari 2007	ANDAL,RKL, RPL
30	Pandaan-Malang	Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor : 660/120/207.1/2014	3 Maret 2014	ANDAL,RKL, RPL
31	Manado-Bitung	Surat Komisi AMDAL Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/KPPT/IL/30/II/2014	24 Februari 2014	ANDAL,RKL, RPL
32	Balikpapan-Samarinda	Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.1/409/TUUA/B.1.3/BPDL	10 Januari 2003	ANDAL,RKL, RPL

Prospek Usaha

Perseroan adalah perusahaan tol berpengalaman, dan saat ini menjadi salah satu perusahaan jalan tol yang mengoperasikan ±593 km tol, Perseroan saat ini menguasai 61% jalan tol di Indonesia. Total panjang jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 972 km. Sampai dengan tahun 2020, Perseroan berencana akan menambah ± 400 km jalan tol baru sehingga total jalan tol yang dioperasikan pada tahun 2020 akan menjadi 1.339,9 km. Di sisi lain, jumlah kendaraan yang melewati jalan tol pun, sekitar 80% (1,4 Miliar) melewati jalan tol yang dioperasikan oleh Perseroan. Dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, menjadikan Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol di Indonesia baik dari sisi panjang jalan tol beroperasi maupun volume lalu lintas transaksi yang melalui jalan tol.

Saat ini Perseroan sedang membangun 14 ruas tol, sebagai berikut:

No.	Konsesi/Ruas	Konsesi Berakhir	Panjang (km)	Mitra	Kepemilikan JSMR
1	BORR	2054	11,00	BUMD	55,00%
2	Semarang-Solo	2055	72,64	BUMD	73,91%
3	Gempol-Pasuruan	45 tahun sejak tanggal efektif	34,15	BUMD	98,60%
4	Cengkareng-Kunciran	35 tahun sejak tanggal efektif	14,19	BUMN & Swasta	76,20%
5	Kunciran-Serpong	35 tahun sejak tanggal efektif	11,19	Swasta	60,00%
6	Surabaya-Mojokerto	2049	36,27	BUMD	55,00%
7	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	40 tahun sejak tanggal efektif	61,70	BUMN	55,00%
8	Solo-Ngawi	35 tahun sejak tanggal efektif	90,10	Swasta	59,99%
9	Ngawi-Kertosono	35 tahun sejak tanggal efektif	87,02	Swasta	59,99%
10	Cinere-Serpong	35 tahun sejak tanggal efektif	10,14	Swasta	55,00%
11	Semarang-Batang	45 tahun sejak tanggal efektif	75,00	Swasta	60,00%
12	Pandaan-Malang	35 tahun sejak tanggal efektif	37,62	BUMN	60,00%
13	Balikipapan-Samarinda	40 tahun sejak tanggal efektif	99,35	BUMN	55,00%
14	Manado-Bitung	40 tahun sejak tanggal efektif	39,90	BUMN	65,00%

Sumber: Perseroan, Q2 2016

Dari 14 ruas tol tersebut, beberapa diantaranya dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, dan tiga diantaranya telah beroperasi sebagian yang terdiri dari ruas tol Semarang-Solo (telah beroperasi 23,1 Km dari total 72,6 Km), ruas Bogor Outer Ring Road (telah beroperasi 5,8 Km dari total 11 Km), ruas tol Surabaya-Mojokerto (telah beroperasi 20,77 Km dari total 36,3 Km). Pengoperasian ruas-ruas tol tersebut akan mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan di tahun-tahun mendatang. Perseroan menargetkan ruas jalan tol baru nomor 1-10 dapat beroperasi penuh pada tahun 2018, meskipun target tersebut sangat dipengaruhi pembebasan lahan oleh Pemerintah

Disamping panjang jalan tol yang terus bertambah, ada beberapa faktor lain yang membuat prospek industri jalan tol yang dikembangkan Perseroan semakin menarik. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Volume lalu lintas pada ruas tol yang dikelola Perseroan diperkirakan akan tetap tumbuh secara positif, sehingga memberikan jaminan pertumbuhan pendapatan berkesinambungan;
2. Masa konsesi yang masih panjang dengan mayoritas akan berakhir pada tahun 2044 untuk 13 ruas yang sedang dioperasikan Perseroan;
3. Jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang sudah ada, sehingga memberi jaminan volume lalu lintas yang telah terbentuk;
4. Adanya potensi penambahan konsesi penguasaan jalan tol melalui rencana untuk mengambil alih ruas-ruas jalan tol investor lain yang terhenti proses investasinya (akuisisi);
5. Posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol Indonesia;

Strategi Usaha

Perseroan bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Dimana untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan secara khusus memiliki beberapa strategi utama antara lain:

- a. Strategi utama
 1. Pengembangan bisnis jalan tol
 2. Pengoperasian jalan tol
 3. Pengembangan bisnis lain
- b. Strategi Pendukung
 1. Pengendalian keuangan
 2. Organisasi dan SDM
 3. Teknologi informasi dan rekayasa teknik
 4. Kepatuhan dan manajemen risiko
 5. Kemitraan dan bina lingkungan

EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tabel berikut menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited).

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2016	2015	2014*
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham – nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) per saham			
Modal dasar – 19.040.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham seri A Dwiwarna dan 6.799.999.999 saham seri B	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000
Tambahan modal disetor – neto	2.453.890.100	2.453.890.100	2.453.890.100
Saldo laba	5.527.563.691	4.895.330.345	3.920.148.320
Penghasilan komprehensif lain:			
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	3.209.032	2.425.483	2.613.862
Kerugian aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(410.471.210)	(333.140.643)	(316.506.521)
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	10.974.191.613	10.418.505.285	9.460.145.761
Kepentingan Nonpengendali	2.426.826.917	1.950.159.181	1.560.583.560
TOTAL EKUITAS	13.401.018.530	12.368.664.466	11.020.729.321

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2011 sampai dengan 2015, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun	Dividen (Rp miliar)	Rasio (%)	dividen / lembar (Rp)	Tanggal Pembayaran
2015	293,28	20	43,13	29 April 2016
2014	491,19	35	72,24	17 April 2015
2013	534,53	40	78,61	23 April 2014
2012	640,83	40	94,24	18 Juni 2013
2011	535,78	40	78,88	21 Juni 2012

PERPAJAKAN

Calon pemegang HMETD dalam PMHMETD I ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan HMETD yang diperoleh melalui PMHMETD I ini.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	:	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota jaringan firma Ernst & Young Global Limited)
Konsultan Hukum	:	Hanafiah Ponggawa & Partners
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 November 2016 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang ● (●) saham lama berhak ● (●) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus0020Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp[●] ([●] Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 11 November 2016.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 3 November 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 7 November 2016 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2016 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 16 November 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Bank Mandiri
Cabang: RS M.H. Thamrin Jakarta
No. Rekening: 129.0003333669
Atas Nama: PT Jasa Marga (Persero) TBK. IPO2

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 15 November 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 17 November 2016 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 15 Juni 2016). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 17 November 2016 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 9 November 2016 sampai dengan 15 November 2016. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 17 November 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 November 2016 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
 - Harga Pelaksanaan PMHMETD I = Rp b
 - Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I = A
 - Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I = B
 - Harga teoritis Saham HMETD = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- = Rp c
= Rp a - Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (SBHMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 3 November 2016 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo, Wisma Sudirman
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp : (021) 5709009, 5708912
Fax : (021) 5709026, 5708914

Apabila sampai dengan tanggal 11 November 2016 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 November 2016 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Investor Relations
PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Kantor Pusat
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550
Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540
E-mail: investor.relations@jasamarga.co.id
Situs: www.jasamarga.com